

## ABSTRAK

Pemasangan pagar laut di berbagai wilayah pesisir Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan serius terkait pelanggaran keamanan maritim, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial-ekonomi bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Keberadaan pagar laut ini mempersulit nelayan untuk mengakses wilayah tangkap mereka, sehingga menyebabkan jumlah hasil tangkapan menurun, biaya operasional meningkat, dan menyebabkan kerusakan kapal sehingga nelayan mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Pemagaran laut ini harus dikaji terhadap konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs 1 dan SDGs 14. Selain itu, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang tepat sangat diperlukan untuk menjamin hak nelayan, menghindari kerusakan ekosistem pesisir, serta memastikan kelestarian ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah atas perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan pada kasus pagar laut dan untuk mengetahui apakah pemagaran laut di wilayah pesisir Tangerang bertentangan dengan tujuan SDGs 1 dan SDGs 14.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi perencanaan perlindungan serta pemberdayaan nelayan yang terdampak pagar laut belum dilaksanakan oleh pemerintah karena tidak adanya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Selain itu, pemasangan pagar laut di wilayah pesisir Tangerang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

**Kata kunci : Pagar laut– perlindungan nelayan – pembangunan berkelanjutan**

## **ABSTRACT**

*The installation of marine fences in various coastal areas of Indonesia has caused serious problems related to maritime security violations, environmental damage, and socio-economic conflicts for fishermen and coastal communities. The presence of these marine fences complicates fishermen's access to their fishing grounds, resulting in decreased catch, increased operational costs, and damage to boats, leading to significant losses for fishermen. This marine enclosure must be assessed in the context of sustainable development goals (SDGs), particularly SDG 1 and SDG 14. In addition, appropriate policies for the protection and empowerment of fishermen are essential to guarantee the rights of fishermen, avoid damage to coastal ecosystems, and ensure the sustainability of the economy and environment. This research aims to understand government policies and strategies regarding the planning for the protection and empowerment of fishermen in the case of marine barriers and to determine whether the establishment of marine barriers in the coastal area of Tangerang contradicts the objectives of SDGs 1 and SDGs 14.*

*The research method used is normative legal research. The approaches employed are the statute approach and the case approach.*

*The results of this study indicate that the policies and strategies for planning the protection and empowerment of fishermen affected by sea fences have not been implemented by the government due to a lack of clarity in the legislation governing it. In addition, the installation of sea fences in the coastal areas of Tangerang contradicts the goals of sustainable development.*

**Keywords:** *Sea fence - protection for fishermen - sustainable development*